

---

## KOLABORASI AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA SERANG

**Delly Maulana**

Administrasi Negara, FISIPKUM, Universitas Serang Raya

---

### **Abstract**

Poverty is generally defined as the lack of financial resources necessary to meet basic needs, such as food, shelter, and health care. However, poverty is not limited to economic deprivation, but also encompasses limited access to essential services such as education, healthcare, and nutrition, which exacerbates the impact of income poverty. Extreme poverty is a condition in which individuals or groups live below the international poverty line, with an income of less than \$1.90 per day based on purchasing power parity. Therefore, this research examines the equalization and collaboration of actors and the formulation of poverty alleviation policies in Serang City. The method employed is a qualitative approach that utilizes both primary and secondary data, along with the Hierarchical Analysis Process (AHP) power analysis technique, to inform a policy strategy. The results showed that the actors involved in poverty alleviation in Serang City are the Central Government, Banten Provincial Government, Serang City Government, Private Sector, Educational Institutions, and Non-Governmental Institutions/Community Organizations. Then, the strategy of providing access to education and economic opportunities is a priority to be formulated and implemented in order to reduce sustainable poverty.

**Keywords:** Policy Formulation, Extreme Poverty, Actor Mapping and Collaboration, Poverty Alleviation, Urban Poverty

### **Article history:**

Submission: 9 June 2025

Revised: 10 June 2025

Accepted: 14 June 2025

Published: 30 June 2025

\*Corresponding author

Email: dellymaulana@unsera.ac.id

---

---

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan Kesehatan (Ökten & Kale, 2009; Schramm & Seid, 2016). Namun, kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang memperburuk dampak kemiskinan pendapatan ("Rural Poverty and the Nonfarm Sector in Rural Asia," 2024).

Dalam konteks Kota Serang, Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang saat ini belum maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Data BPS Tahun 2024 menunjukkan persentasi penduduk miskin di Kota Serang sekitar 5,65 persen, berada di posisi ke 4 terbanyak dan di bawah rata persentasi penduduk miskin di Provinsi Banten, yakni sekitar 5,84 persen (BPS Banten, 2025). Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen)**

No	Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah
1.	Kab. Pandeglang	9,18	
2.	Kab. Lebak	8,44	
3.	Kab. Tangerang	6,55	
4.	Kab. Serang	4,51	
5.	Kota Tangerang	5,43	
6.	Kota Cilegon	3,75	
7.	Kota Serang	5,65	
8.	Kota Tangerang Selatan	2,36	
9.	Provinsi Banten	5,84	

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

Selanjutnya, jika dilihat dari kemiskinan ekstrem di Kota Serang, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mencatat sebanyak 202.460 warga Kota Serang masuk kedalam kategori fakir miskin, sedangkan untuk warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem sekitar 11.549 jiwa di tahun 2024 (bantenintens, 2025). Perlu diketahui bahwa kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Kompas.id, 2023).

Untuk meminimalkan hal tersebut maka perlu ada pemetaan kemiskinan ekstrem di Kota Serang. Pemetaan kemiskinan ekstrem adalah alat penting yang digunakan oleh peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan. Dari hasil penelusuran artikel, ada beberapa temuan dan trend penelitian kemiskinan, yakni : Pertama, peningkatan penelitian kemiskinan. Penelitian tentang kemiskinan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan fokus pada berbagai aspek seperti garis kemiskinan, kebijakan sosial, dan standar hidup (Chansanam & Li, 2022, 2023); dan Kedua, fokus pada kemiskinan anak. Kemiskinan anak menjadi perhatian utama karena dampak jangka

panjangnya pada individu dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif terhadap anak-anak dalam penelitian kemiskinan dapat memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengurangan kemiskinan (Bessell et al., 2020). Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan ini perlu ada kebijakan terhadap akses layanan Pendidikan dan peluang ekonomi, sebab kurangnya akses ke pendidikan dan peluang ekonomi di daerah-daerah tertentu mengakibatkan kemiskinan yang berkelanjutan (Cho et al., 2012).

## METODE

Metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal memetakan kemiskinan ekstrem di Kota Serang menggunakan sumber data sekunder. Sedangkan analisis pemataan aktor dan formulasi pengentasannya menggunakan data primer dan sekunder (Wawancara Mendalam, Dokumentasi, dan Observasi) dengan Teknik analisis data menggunakan kualitatif dan Analisis Hirarki Proses (AHP) sehingga akan tergambaran strategi-strategi kebijakan prioritas dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem di Kota Serang.

## HASIL DAN DISKUSI

### Kemiskinan Ekstrim di Kota Serang

Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Namun, kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan finansial, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang memperburuk dampak kemiskinan pendapatan.

Secara konseptual, kemiskinan ekstrem adalah kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Kompas.id, 2023). Kemiskinan ekstrem di daerah perkotaan adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan spesifik kota serta kebijakan publik yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi (Jargowsky, 2012).

Ada 2 (dua) penyebab kemiskinan ekstrem di daerah perkotaan dan saling terkait, yakni : *Pertama*, Perubahan dalam struktur ekonomi sering kali mengakibatkan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor tertentu, yang kemudian memperburuk kemiskinan di daerah-daerah tertentu (Guo et al., 2018). dan *Kedua*, Distribusi pendapatan yang tidak merata dan perubahan demografi juga memainkan peran penting dalam pola kemiskinan perkotaan. Ketidaksetaraan pendapatan dan perubahan dalam komposisi demografis dapat memperburuk kondisi kemiskinan di kota-kota (Andreoli et al., 2022). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan program pendidikan dan pengembangan keterampilan memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan individu, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan kesempatan kerja yang lebih baik. Sebab, kebijakan publik yang tidak efektif atau tidak adil dapat memperburuk kemiskinan perkotaan Misalnya, kebijakan yang tidak mendukung inklusi sosial dan ekonomi dapat memperkuat segregasi dan kemiskinan (Jargowsky, 2012; Reardon & Dymén, 2015).

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Serang hingga akhir tahun 2024 mencapai 7,12 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Banten dan rata-rata nasional. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada 28 Februari 2025, TPT di Kota Serang mencapai 26.686 orang atau mencapai 7,12 persen dari total angkatan kerja 374.767 orang. Tingkat pengangguran tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Banten yang hanya sebesar 7,02 persen dan nasional sebesar 4,80 persen (Banteninside, 2025). Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu informan yang mengungkapkan bahwa kemiskinan di Kota Serang disebabkan oleh sulitnya mencari pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan biaya hidup yang terus naik serta terbatasnya akses layanan Pendidikan dan Kesehatan, yakni sebagai berikut :

*"Menurut saya, penyebab sebagian masyarakat di Kota Serang menjadi miskin itu cukup beragam. Salah satunya karena pendidikan yang masih terbatas, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak. Selain itu, lapangan kerja juga belum terlalu banyak, sementara persaingan makin ketat. Biaya hidup yang terus naik, tapi pendapatan tidak selalu mengikuti, juga jadi beban. Faktor lain seperti usaha yang gagal atau kondisi kesehatan yang memerlukan biaya besar juga bisa membuat orang jatuh miskin. Saya rasa bantuan pemerintah sudah ada, tapi mungkin belum semua orang yang membutuhkan bisa merasakannya secara merata. (NS, 11 Juli 2025)*

Hal ini juga diungkapkan informan lainnya bahwa penyebab kemiskinan di Kota Serang adalah tingginya pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, yakni sebagai berikut :

*"Kemiskinan di Kota Serang disebabkan Tingkat pengangguran yang tinggi dan sulitnya mencari pekerjaan". (TM, 11 Juli 2025)*

Dari hasil penelitian disimpulkan bawah kondisi yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Kota Serang adalah pengangguran sebab secara konseptual pengangguran menyebabkan kemiskinan, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yakni : Pengangguran akan berpengaruh terhadap tidak adanya pendapatan tetap Masyarakat sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan Kesehatan; Kedua, menurunkan daya beli Masyarakat sehingga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi; dan Ketiga, Masyarakat miskin menyulitkan akses layanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang harus memberikan kebijakan layanan khusus Masyarakat miskin.

### **Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Serang**

Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Serang perlu didasarkan pada keterlibatan aktif beberapa aktor (kolaborasi aktor) yang memiliki tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan untuk mencapai titik temu dalam prinsip-prinsip tata kelola kebijakan pengentasan kemiskinan (Maulana et al., 2025). Dari hasil pemetaan aktor yang bisa terlibat dalam pengetasan kemiskinan ekstrem di Kota Serang, baik sektor pemerintah, swasta, atau Lembaga Non Pemerintah. Hal ini terlihat pada tabel (2) sebagai berikut :

**Tabel 2****Aktor-aktor dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Serang**

No	Jenis Lembaga	Peran	Kekuasaan, Pengaruh, dan Kepentingan
1.	Pemerintah Kota Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan, kebijakan/program kemiskinan</li> <li>• Mengkoordinasikan dengan pemerintah diatasnya (Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat) terkait penyelesaian kemiskinan di Kota Serang</li> <li>• Memberikan bantuan sosial kepada Masyarakat miskin terkait akses Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat secara ekonomi</li> <li>• Mendorong Pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian Kota Serang sehingga memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Serang.</li> </ul>	Memiliki kekuasaan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi
2.	Pemerintah Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan melaksanakan kebijakan atau program pengentasan kemiskinan di Kota Serang melalui kewenangannya sebagai Pemerintah Provinsi</li> <li>• Melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kota Serang sesuai kewenangannya, salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, seperti : Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten.</li> <li>• Melakukan program pemberikan akses Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan ekonomi yang</li> </ul>	Memiliki kekuasaan yang tinggi, pengaruh, dan kepentingan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kota Serang, karena Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten.

		dilakukan oleh masing-masing OPD terkait.	
3.	Swasta	Memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang melalui aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta memiliki kewajiban CRS untuk ikut serta dalam pengetasan kemiskinan di Kota Serang	Memiliki kekuasaan yang sedang,
4.	Lembaga Pendidikan	Memiliki kepentingan untuk ikut serta mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Serang melalui proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.	Memilik kekuasaan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang kuat.
5.	Lembaga Swadaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Memiliki kewajiban ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui program sosial, misalnya yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga zakat untuk pengentasan kemiskinan di Kota Serang	Memiliki kekuasan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang kuat untuk pengentasan kemiskinan di Kota Serang.

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2025

Dari hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki peran yang beragam, kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang beragam. Namun peran-peran tersebut harus diikat oleh sebuah kolaborasi antar aktor sehingga memberikan sumbangsih yang signifikan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Serang. Sebab secara konsep pengentasan kemiskinan yang efektif membutuhkan model tata kelola yang melibatkan berbagai mitra, seperti lembaga pemerintah, LSM, bisnis, dan masyarakat lokal (Biridlo'i Robby & Hariyadi, 2024; Mustari et al., 2024). Hal ini diungkapkan oleh informan yang menyatakan bahwa

*"Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga non pemerintah harus bersifat terbuka dan saling melengkapi. Pemerintah bisa membuat kebijakan dan program yang jelas, sementara pihak swasta membantu lewat investasi atau membuka peluang kerja. Lembaga non pemerintah bisa mendampingi masyarakat, memberikan edukasi, dan menyalurkan bantuan langsung. Semua pihak sebaiknya duduk bersama untuk merencanakan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau bisa, kolaborasinya jangan hanya di atas kertas, tapi benar-benar dilaksanakan dan dipantau supaya hasilnya nyata dan bermanfaat untuk Masyarakat." (NS, 11 Juli 2025)*

Hal ini diungkapkan salah satu informan lainnya yang mengungkapkan masing-masing memiliki kekuatan, pengaruh, dan kepentingan yang saling berkolaborasi untuk mengentaskan

kemiskinan di Kota Serang, yakni sebagai berikut :

*"Menginventarisir keunggulan setiap kecamatan yang ada di Kota Serang, kemudian mengajak masyarakat untuk berinovasi dengan keunggulannya dengan disupport oleh anggaran yang diajukan dari pihak swasta dan lembaga non pemerintah sebagai langkah mengurangi kemiskinan dan untuk kemajuan daerah Kota Serang." (AM, 11 Juli 2025)*

Oleh karena itu, model ini membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan upaya-upaya yang terkoordinasi. Misalnya model tata kelola multi aktor untuk mengelola dana zakat melibatkan berbagai lembaga untuk memaksimalkan dampak inisiatif pengentasan kemiskinan (Mustari et al., 2024). Namun untuk mengefektifkan kolaborasi antar aktor maka perlu ada koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan sangat penting, tetapi pada praktiknya sangat sulit dilakukan karena ketidakseimbangan kekuasaan, keterbatasan sumber daya, dan kepentingan yang saling bertentangan (Liu & Wang, 2024; Mustari et al., 2024). Oleh karena itu, harus dibangun mekanisme koordinasi yang sesuai dan mencapai keseimbangan kekuasaan yang adil di antara para pemangku kepentingan sehingga formulasi kebijakan pengetasan kemiskinan bisa dilaksanakan secara efektif dan berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Serang.

### Strategi Kebijakan Pengetasan Kemiskinan di Kota Serang

Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan yang kompleks dan beragam. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan Kesehatan (Choudhury, 2020; Salamova et al., 2023). Oleh karena itu, strategi kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan. Misalnya, kemiskinan di perkotaan tidak hanya terkait dengan pendapatan rendah tetapi juga dengan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi (Choudhury, 2020).

#### Priorities

These are the resulting weights for the criteria based on your pairwise comparisons:

Cat		Priority	Rank	(+)	(-)
1	Program peningkatan kualitas pendidikan	48.3%	1	28.3%	28.3%
2	Sistem pemodalaman UMKM	2.6%	6	1.3%	1.3%
3	Sinergi Bansos dengan pembedayaan masyarakat	4.1%	5	1.8%	1.8%
4	Mendorong UMKM untuk lebih kreatif	6.5%	4	3.0%	3.0%
5	Peningkatan keterampilan Masyarakat	20.5%	2	7.0%	7.0%
6	Kolaborasi antar aktor	18.0%	3	8.9%	8.9%

#### Decision Matrix

The resulting weights are based on the principal eigenvector of the decision matrix:

	1	2	3	4	5	6
1	1	9.00	6.00	8.00	3.00	6.00
2	0.11	1	0.50	0.20	0.17	0.12
3	0.17	2.00	1	0.50	0.20	0.14
4	0.12	5.00	2.00	1	0.25	0.20
5	0.33	6.00	5.00	4.00	1	2.00
6	0.17	8.00	7.00	5.00	0.50	1

Number of comparisons = 15  
 Consistency Ratio CR = 9.1%

Principal eigen value = 6.572  
 Eigenvector solution: 6 iterations, delta = 2.1E-8

**Gambar 1**  
**Hasil Analisis Hirarki Proses dengan AHP Calculator**

Oleh karena itu, dari hasil penelitian dan analisis menggunakan Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Serang adalah sebagai berikut : *Pertama*, program peningkatan kualitas pendidikan formal dan vokasi; *Kedua*, meningkatkan sistem pemodaln UMKM yg tepat sasaran; *Ketiga*, peningkatan sinergi antara bantuan sosial (Bansos) dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri tidak tergantung pada bansos; *Keempat*, mendorong UMKM untuk lebih kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan; *Kelima*, memberi motivasi serta dukungan untuk hidup mandiri dan inovatif, dan memberi beasiswa pendidikan tingkat lanjut bagi masyarakat yang berprestasi tetapi kurang mampu; *Keenam*, melalui program pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keterampilan Masyarakat untuk berwiraswasta; dan *Keenam*, kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan .

## KESIMPULAN

Kebijakan pengentasan kemiskinan sangat penting karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek kemiskinan, kualitas tata kelola, pendekatan terpadu, inovasi yang adaptif, dan peran Pendidikan. Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang seharusnya bisa menurunkan kemiskinan ekstrem. Kondisi ini harus menjadi tanggung jawab semua aktor Pembangunan di Kota Serang. Sebab secara konseptual, pengentasan kemiskinan yang efektif membutuhkan model tata kelola yang melibatkan berbagai mitra, seperti lembaga pemerintah, LSM, bisnis, dan masyarakat lokal. Dari hasil penelitian ini, peneliti mendorong peneliti selanjutnya untuk melihat fenomena kemiskinan dari prespektif kultural akibat dampak kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat bantuan sosial.

## REFERENSI

- Andreoli, F., Mertens, A., Mussini, M., & Prete, V. (2022). Understanding trends and drivers of urban poverty in American cities. *Empirical Economics*, 63(3), 1663–1705. <https://doi.org/10.1007/s00181-021-02174-5>
- Banteninside. (2025). Pengangguran di Kota Serang Masih Tinggi. *Banten inside*.
- bantenintens. (2025). 11.549 Warga Kota Serang Masuk Kategori Miskin Ekstrem. *Bantenintens*. <https://bantenintens.co.id/2025/03/21/11-549-warga-kota-serang-masuk-kategori-miskin-ekstrem/>
- Bessell, S., Siagian, C., & Bexley, A. (2020). Towards child-inclusive concepts of childhood poverty: The contribution and potential of research with children. *Children and Youth Services Review*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105118>
- Biridlo'i Robby, U., & Hariyadi, A. R. (2024). STAKEHOLDER SYNERGY IN SOCIAL

---

INNOVATION: EFFORTS TO REDUCE THE IMPACT OF POVERTY IN INDONESIA.  
*Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n01-031>

BPS Provinsi Banten. (2025). Data Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten.

Chansanam, W., & Li, C. (2022). Scientometrics of Poverty Research for Sustainability Development: Trend Analysis of the 1964–2022 Data through Scopus. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095339>

Chansanam, W., & Li, C. (2023). Knowledge Structure and Trends in Poverty Research on the Web of Science Database: A Bibliometric Analysis. *Journal of Mekong Societies*, 19(2), 120–152. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85170221857&partnerID=40&md5=68ae3d17798f83a6c333369cf8badc50>

Cho, S.-H., Jung, S., Roberts, R. K., & Kim, S. G. (2012). Interrelationship between poverty and the wildland-urban interface in metropolitan areas of the southern US. *Applied Economics*, 44(11), 1405–1416. <https://doi.org/10.1080/00036846.2010.541392>

Choudhury, B. (2020). Addressing urban poverty through empowerment and inclusion in India. In *Rights and Security in India, Myanmar, and Thailand* (pp. 15–29). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-1439-5\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-15-1439-5_2)

Guo, Y., Chang, S.-S., Sha, F., & Yip, P. S. F. (2018). Poverty concentration in an affluent city: Geographic variation and correlates of neighborhood poverty rates in Hong Kong. *PLoS ONE*, 13(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190566>

Jargowsky, P. A. (2012). Urban Poverty, Economic Segregation, and Urban Policy. In *The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195380620.013.0014>

Kompas.id. (2023). *Pengentasan Kemiskinan Ekstrem*. 2, 1–13.

Liu, L., & Wang, Y. (2024). The Multilevel Politics of Government-Business Collaboration in China's Rural Poverty Alleviation. *China Quarterly*, 259, 661–676. <https://doi.org/10.1017/S0305741023001479>

Maulana, D., Berthanila, R., Nugroho, C., & Jumiati, I. E. (2025). Policy of Disaster Mitigation and Post-Disaster Sustainable Tourism in Indonesia: Case Study of Tanjung Lesung Marine Tourism Banten. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(3), 1103–1112. <https://doi.org/10.18280/ijspd.200316>

Mustari, N., Razak, R., Junaedi, J., Fatmawati, F., Hawing, H., & Baharuddin, T. (2024). Multipartner governance and the urgency of poverty alleviation policy: Zakat fundraising management. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2361529>

Ökten, Z., & Kale, T. (2009). The Structure of Regional Poverty in Turkey and Anti-Poverty Policies. *Amme İdaresi Dergisi*, 42(3), 59–91. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84878522152&partnerID=40&md5=482087463fbfde2f885f54c2ef473d2a>

---

Reardon, M., & Dymén, C. (2015). Towards the just city: Addressing poverty and social exclusion in the Stockholm Region. *Local Economy*, 30(7), 838–856.  
<https://doi.org/10.1177/0269094215601821>

Rural Poverty and the Nonfarm Sector in Rural Asia. (2024). In *Reducing Rural Poverty in Asia: Challenges and Opportunities for Microenterprises and Public Employment Schemes* (pp. 3–15). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003578345-2>

Salamova, A., Kantemirova, M., & Makazieva, Z. (2023). Integrated approaches to poverty problems. In T. M.Y. (Ed.), *E3S Web of Conferences* (Vol. 451). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345105016>

Schramm, M., & Seid, J. (2016). Not Only 'a Simple Math Equation': Business Organisations as Agents for Poverty Reduction. In *Absolute Poverty and Global Justice: Empirical Data – Moral Theories – Initiatives* (pp. 219–232). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315565453-27>